

## SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KAS PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Berupilihen br Ginting  
Akuntansi, Politeknik unggul LP3M Medan

### ABSTRAK

*Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengawasan internal penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode studi dokumentasi, metode wawancara dan metode kepustakaan. Metode analisis data yang dipakai adalah metode deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sudah baik karena sudah melibatkan fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang lengkap serta menerapkan pengawasan internal kas pada perusahaan.*

*Kata Kunci : Sistem Pengawasan Internal, Kas*

### I. PENDAHULUAN

Kendala-kendala perekonomian perusahaan yang berhubungan dengan pengawasan harta bendanya, khususnya masalah kas, dimana sebagian besar transaksi yang dilakukan perusahaan / instansi selalu melibatkan kas. Apalagi perkembangan teknologi yang terjadi pada masa sekarang.

Teknologi yang semakin maju mempengaruhi perkembangan pada setiap perusahaan maupun lembaga, baik swasta ataupun pemerintah. Masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan/ instansi juga semakin rumit terutama dalam penyajian laporan keuangan.

Setiap perusahaan memerlukan adanya sistem pengawasan internal kas yang baik, terutama dalam hal pengelolaan kas. Kas sangat mempengaruhi transaksi dalam perusahaan. Oleh karena itu penggunaannya harus secara optimal.

Kas merupakan aset perusahaan yang paling lancar (liquid) dari seluruh aktiva yang ada. Dan kas juga merupakan aktiva yang paling harus dijaga. Hal ini disebabkan karena kas sangat mudah dialihkan atau dipindah tangankan karena kas tidak memiliki identitas kepemilikan. Oleh karena itu perusahaan / instansi harus melakukan pengawasan untuk melindungi kas. Ini disebabkan karena setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan / instansi selalu berhubungan dengan kas. Apabila pengawasan internal terhadap kas dalam sebuah perusahaan / instansi berjalan dengan efektif maka penyalahgunaan kas dapat diketahui dengan mudah.

Di dalam mencapai tujuannya, perusahaan / instansi selalu menghadapi persoalan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dilihat dari ciri-ciri dan kepentingannya, kas selalu menjadi objek utama yang disalahgunakan, untuk itu diperlukan adanya pengawasan-pengawasan internal yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kas.

Pengawasan dapat diartikan sebagai alat untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas perusahaan / instansi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu cara untuk melaksanakan pengawasan adalah dengan menyusun sistem pengawasan internal kas yang memadai dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam mengamankan harta suatu perusahaan / instansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong karyawan untuk selalu mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen sehingga kecurangan dan penyalahgunaan kas dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihindari. Dengan kata lain pengawasan internal yang baik didalam suatu perusahaan / instansi dapat menunjang keberhasilan operasi suatu perusahaan / instansi.

Pengawasan internal ini membutuhkan setidaknya-tidaknya pemisahan fungsi dan tugas didalam pengurusan kas, misalnya pemisahan tugas antara penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk mencapai pengawasan yang baik ini perlu juga ditunjang dengan sarana-sarana, prosedur-prosedur, dan alat-alat sehingga tujuan perusahaan dapat dengan lebih mudah tercapai.

Dengan landasan pemikiran di atas, maka penulis memilih judul "Sistem Pengawasan Internal Kas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara".

Dari latar belakang yang ada, maka dapat dikemukakan perumusan masalah adalah: Bagaimana Sistem Pengawasan Internal Kas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara?

Sehubungan dengan keterbatasan waktu, biaya, kemampuan penulis dan banyaknya cakupan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penulisan agar judul dan latar belakang dapat dipahami dengan jelas maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya mengenai Sistem Pengawasan Internal Penerimaan Kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian dilaksanakan oleh penulis dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengawasan Internal Penerimaan Kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengawasan Internal Pengeluaran Kas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Uta

Adapun manfaat yang dilakukan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Penulis
  - a. Menambah dan memperluas wawasan penulis mengenai pengawasan internal kas pada masa yang akan datang.
  - b. Memberikan suatu karya penelitian berupa penjelasan teori yang menarik, secara jelas, lengkap sehingga dapat meningkatkan daya mutu minat belajar kita.
2. Manfaat Bagi Politeknik Unggul LP3M Medan
  - a. Memberikan karya penelitian yang dapat mendukung sarana pendidikan sebagai media pembelajaran yang berupa penjelasan teori secara jelas, lengkap, bermutu, mendidik yang menyenangkan dan tidak membosankan.
  - b. Hasil penelitian akan sangat bermanfaat sebagai bahan informasi atau referensi penelitian dan penulisan karya ilmiah/penelitian yang selanjutnya terutama mengenai tentang analisis pendapatan dan beban usaha dalam meningkatkan laba.
3. Manfaat Bagi Perusahaan
 

Dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat dalam melaksanakan pengawasan internal kas pada masa yang akan datang.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini penulis melakukan beberapa metode dalam mengumpulkan data referensi diantaranya :

1. Metode Studi Dokumentasi
 

Dengan cara mencari, melihat dan mempelajari dokumen-dokumen tentang perusahaan melalui pengumpulan informasi yang bersumber dari laporan pengawasan internal perusahaan serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Metode Wawancara
 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan masalah yang diangkat.
3. Metode Kepustakaan
 

Penulis mendapatkan sumber-sumber data dari buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sistem pengawasan internal kas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Sumber Penerimaan Kas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Sumber penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Retribusi Kekayaan Daerah yang dikelola oleh UPT PPMHP Medan.
2. Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dikelola oleh UPT Budidaya Ikan Kerasaan.
3. Retribusi Tempat Pelelangan ikan yang dikelola oleh UPT.PPP Tanjung Balai Asahan.
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang dikelola oleh Bidang Perikanan Tangkap.

### 3.2 Sistem Pengawasan Internal Penerimaan Kas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

#### A. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara.

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Sekretaris Dinas
 

Bertanggungjawab menerima Bukti Transfer Bank (BTB) dan Surat Pemberitahuan (SP) dari debitur dan membuat Daftar Surat Pemberitahuan (DSP).
2. Kasir
 

Bertanggungjawab membuat Laporan Penerimaan Kas (LPK) setelah menerima Daftar Surat Pemberitahuan (DSP) dan Bukti Transfer Bank (BTB) dari Sekretaris Dinas.
3. Kepala Bidang
 

Bertanggungjawab membuat Surat Pemberitahuan yang berisi daftar tagihan kepada perusahaan / debitur, memberikan Surat Pemberitahuan (SP) kepada debitur untuk menyetor uang ke bank dan menyerahkan Bukti Transfer Bank (BTB) kepada Sekretaris Dinas.
4. Kepala Sub Bidang Keuangan
 

Bertanggungjawab mencatat penerimaan kas dan Jurnal Penerimaan Kas (JPK)

#### B. Dokumen yang dipakai dalam sistem penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen yang dipakai dalam sistem penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Surat Pemberitahuan (SP)  
Surat Pemberitahuan dibuat oleh Kepala Bidang yang berisi rincian utang debitur dan berfungsi sebagai patokan / besaran jumlah kas yang harus ditransfer oleh debitur ke kas perusahaan.
2. Daftar Surat Pemberitahuan (DSP)  
Daftar Surat Pemberitahuan berisi rekapitulasi jumlah penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi Sekretaris Dinas.
3. Bukti Transfer Bank (BTB)  
Dokumen ini sebagai bukti bahwa debitur sudah menyetor sejumlah uang ke rekening Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Utara.
4. Laporan Penerimaan Kas (LPK)  
Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh kasir setelah menerima Daftar Surat Pemberitahuan (DSP) dan Bukti Transfer Bank (BTB) dari Sekretaris Dinas.

**C. Catatan yang dipakai dalam sistem penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.**

Catatan yang dipakai dalam sistem penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Kartu Piutang  
Catatan yang dibahas oleh Kepala Dinas untuk mencatat mutasi piutang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
2. Jurnal Penerimaan Kas  
Catatan yang dibuat oleh kepala Sub Bagian Keuangan setelah menerima Laporan Penerimaan Kas (LPK), Daftar Surat Pemberitahuan (DSP) dan Surat Pemberitahuan (SP) dari kasir.

**D. Pengawasan internal penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.**

Pengawasan internal penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Debitur membayar tagihan / utang langsung ke rekening perusahaan (transfer via bank).
2. Kepala Bidang melakukan tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan Sekretaris Dinas, Kasir dan Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Pencatatan penerimaan kas di catat setiap hari oleh semua fungsi / bagian.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap Sistem Pengawasan Internal Kas Pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Sistem Pengawasan Internal Kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sudah baik karena :

1. Fungsi yang terkait dalam penerimaan kas sudah melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan tidak ada rangkap jabatan.
2. Dokumen yang dipakai dalam sistem pengawasan internal penerimaan kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera utara sudah baik karena sudah melakukan pencatatan penerimaan kas dari awal sampai pada penerimaan Bukti Transfer Bank (BTB).

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaky. 2013. *Intermediate Accounting*. Edisi Kesembilan. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ke-7 Cetakan ke-9. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Niswonger, Warren, Reeve, Fees. 2012. *Prinsip-prinsip Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nugroho Widjayanto. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
- Rama Dasaratha V/ Frederick L. Jones. 2012. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Republic Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri* No.4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Soemarso S.R. 2012. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku Satu. Edisi 13. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.